

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Jalan P.Diponegoro No 101 (0295) 691033 Fax (0295) 691033

Kode Pos 59211

Website: <https://dputaru.rembangkab.go.id>

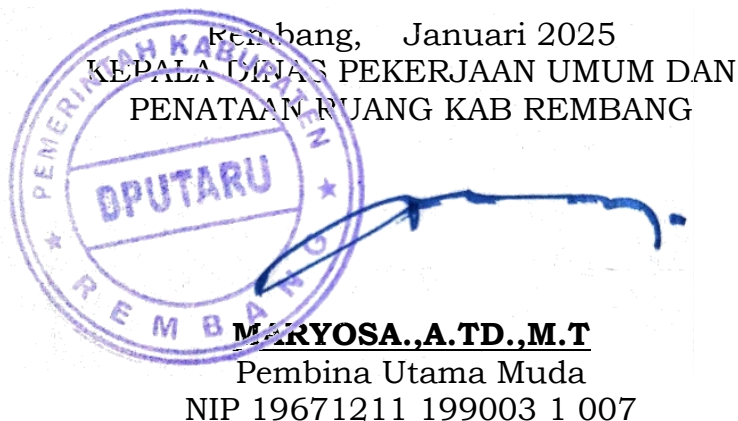
Email: [dputarurembang@gmail.com](mailto:dputarurembang@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, Januari 2025  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KAB REMBANG



**MARYOSA.,A.TD.,M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19671211 199003 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Penjelasan Umum Organisasi .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2.2 Anggaran .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Dasar Hukum .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>24</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>24</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024 .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2021,2022,2023 .....</b>	<b>27</b>
<b>3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....</b>	<b>30</b>
<b>3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....</b>	<b>33</b>

<b>3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. .....</b>	<b>36</b>
<b>3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....</b>	<b>42</b>
<b>3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....</b>	<b>46</b>
<b>3.1.9 Realisasi Anggaran .....</b>	<b>58</b>
<b>3.1.10 Prestasi Yang Di capai .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024</b>	<b>10</b>
<b>Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan sasaran</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan dan Sub kegiatan</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan &amp; Sub Kegiatan</b>	<b>59</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1</b>	<b>Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang</b>	<b>4</b>
-------------------	--	----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi**

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :

### **1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

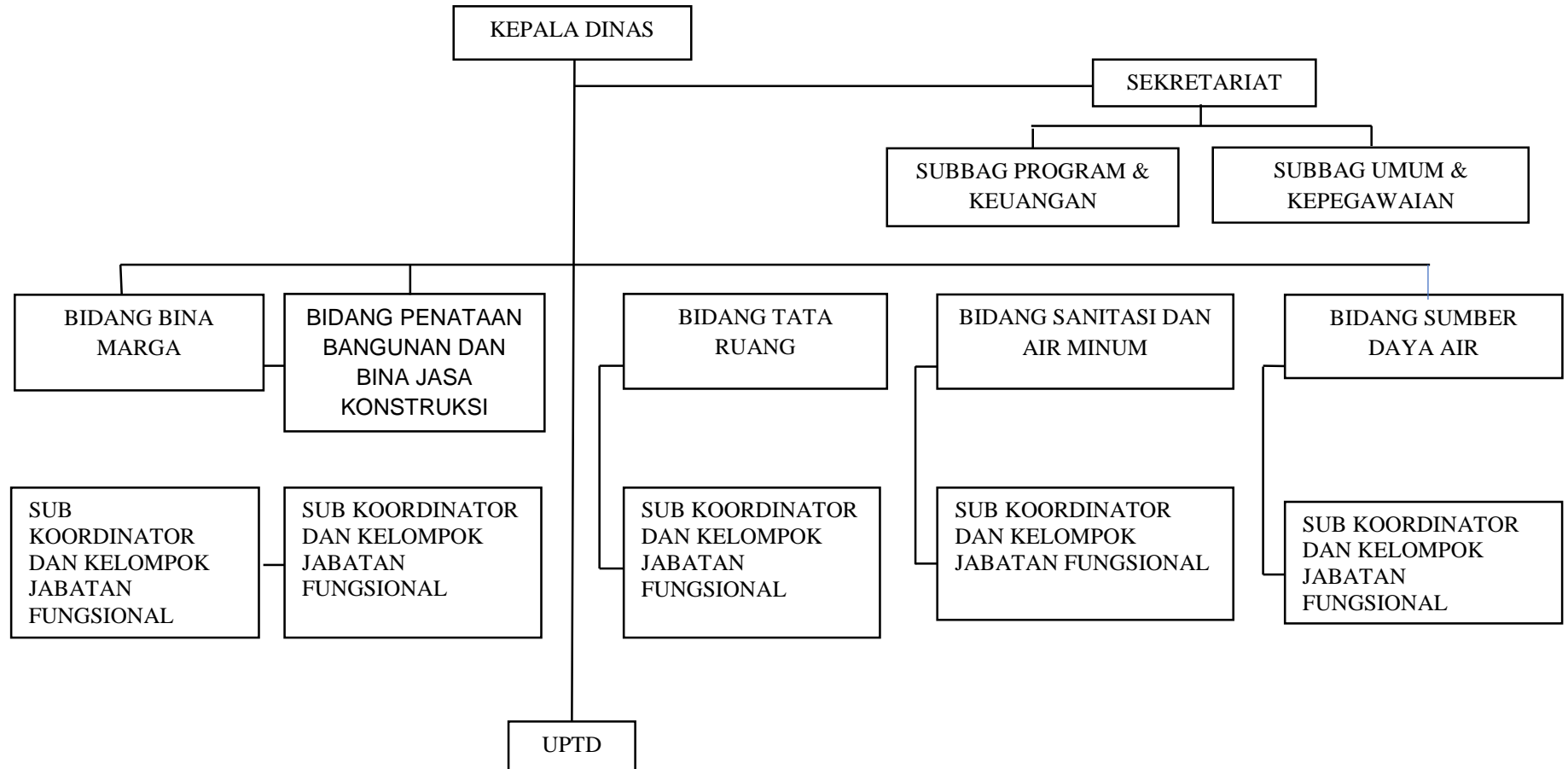
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



Sumber: Peraturan Bupati No 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

### 1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :

**Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024**

<b>Sumber</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Total Anggaran</b>	<b>2023</b>	<b>185.562.259.281,00</b>
Anggaran dari PemKab	2023	159.096.337.581,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2023	16.300.765.700,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	2023	1.818.861.000
DAK Fisik- Bidang Air Minum Penugasan	2023	8.346.295.000
Insentif Fiskal	2023	0
<b>Total Anggaran</b>	<b>2024</b>	<b>63.794.147.311,00</b>
Anggaran dari PemKab	2024	35.032.028.311,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2024	8.882.683.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	2024	3.498.716.000,00
DAK Fisik- Bidang Air Minum Penugasan	2024	3.704.824.000,00
Insentif Fiskal	2024	12.675.896.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPUTARU Kab Rembang

Adapun total nilai anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2024 sesuai Pergeseran 8 DPPA adalah Rp 63.794.147.311, 00.

### 1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

### 1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 adalah:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Prestasi yang diraih

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan dari DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Insfrastruktur Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah**  
**Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur			Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Na	58,05	61.61	66.88	70.44
1.3.1				Indeks Konektivitas	Na	28,07	36,35	46.71	62.25
1.3.1		1.3.2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	Na	0.46	0.48	0.5	0.52
1.3.1				Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Na	58,05	61.61	66.88	70.44
1.3.1				Indeks Konektivitas	Na	28,07	36,35	46.71	62.25
1.3.1		1.3.2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Na	69.87	72.93	76.13	79.2
1.3.1				Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Na	58,05	61.61	66.88	70.44
1.3.1				Indeks Konektivitas	Na	28,07	36,35	46.71	62.25
1.3.1		1.3.2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	Na	40	45	55	60
1.3.1				Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Na	58,05	61.61	66.88	70.44

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.3.1			Indeks Konektivitas	Na	28,07	36,35	46.71	62.25	
1.3.1		1.3.2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Na	4	6	8	9
1.3.1			Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Na	58,05	61.61	66.88	70.44	
1.3.1			Indeks Konektivitas	Na	28,07	36,35	46.71	62.25	
1.3.1		1.3.2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Na	46.6	47	48.3	50
1.3.1			Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Na	58,05	61.61	66.88	70.44	
1.3.1			Indeks Konektivitas	Na	28,07	36,35	46.71	62.25	
1.3.1		1.3.2.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	Na	69,5	70,25	71,68	72,72

Sumber : Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1.1.1#.1	Nilai SAKIP		Hasil evaluasi SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah.	Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada kementerian/1 embaga/pemerintah daerah.	Laporan Hasil Evaluasi oleh Deputi RBKUNWAS Kementerian PANRB.
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	1.3.1#.1	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur		salah satu indikator untuk melihat peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur di daerah	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur = $(0,2 \times \text{Indeks Aksesibilitas Jalan}) + (0,3 \times \text{Indeks Akses Layanan Dasar}) + (0,1 \times \text{Persentase Ketersediaan Air Baku}) + (0,1 \times \text{Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang}) + (0,3 \times \text{Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan})$	DPUTAR U

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
						Gedung dan Jasa Konstruksi).	
1.3.1		1.3.1.#. 2	Indeks Konekt ivitas		salah satu indikator untuk melihat peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur di daerah	Indeks Konektivitas = (0,4 x Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan) + (0,3 x Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (0,3 x Indeks Peningkatan Keselamatan Lalulintas)	DISHUB
1.3.1.1	Meningkat nya pemerataa n dan kualitas pembangu nan jalan dan jembatan	1.3.1.1# 0.1	Indeks Aksebil itas Jalan	nilai	Jalan Dalam Kondisi Mantap	(panjang jalan kondisi mantap )/(Luas Wilayah Administrasi )	Bidang Bina Marga DPUTAR U
1.3.1.2	Meningkat nya Akses Layanan Dasar	1.3.1.2# 0.1	Indeks Akses ibilitas Layana n Dasar	nilai	Persentase (%) Rumah TanggaYang Mengakses Air Minum Layak,Persenta se Rumah Tangga Yang Mengakses Sanitasi Layak,persenta se panjang drainase dalam kondisi mantap	(Capaian Air Minum+Air Limbah Domestik+drai nase+persamp ahan )/3	Bidang Sanitasi dan Air Minum DPUTAR U
1.3.1.3	Meningkat nya Kinerja Pengelolaa	1.3.1.3# 0.1	Persent ase Keterse diaan	prosentase	Persentase Ketersediaan Air Baku	(jumlah ketersediaan air baku)/(kebutu	Bidang Sumber Daya Air DPUTAR U

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	n Sumber Daya Air		Air Baku			han air baku ) x 100%	
1.3.1.4	Meningkat nya Perwujuda n Rencana Tata Ruang Daerah	1.3.1.4# 0.1	Capaia n Perwuj udan Progra m Rencan a Tata Ruang	prosentase	Capaian perwujudan program rencana tata ruang	( jumlah dokumen RTR yang ditetapkan)/(ju mlah dokumen RTR yang direncanakan ) x 100%	Bidang Tata Ruang DPUTAR U
1.3.1.5	Meningkat nya Kualitas Hasil Penyeleng garaan Bangunan Gedung Dan Lingkunga nnya serta layanan jasa kontruksi	1.3.1.5# 0.1	% Pertum buhan Bantua n Teknis Bangu nan Gedun g dan Jasa Konstr uksi	prosentase	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa kontruksi	(Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun (n)- bantuan teknis bangunan dan jasa konstruks tahun (n- 1))/(Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun n-1) x 100%	Bidang Penataan Banguna n dan Bina Jasa Konstruk si DPUTAR U
1.3.1.6	Meningkat nya kualitas dokumen perencana an, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksana an program kegiatan, dan Meningkat	1.3.1.6# 0.1	Nilai SAKIP OPD		Nilai Sakip OPD	Nilai Sakip OPD	SEKRET ARIAT DPUTAR U

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	knya akuntabilit as kinerja dan kualitas pelayanan publik						

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur			Indeks Aksesibilitas Infrastruktur		66.88
1.3.1				Indeks Konektivitas		46.71
1.3.1		1.3. 2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	nilai	0.50
1.3.1				Indeks Aksesibilitas Infrastruktur		66.88
1.3.1				Indeks Konektivitas		46.71
1.3.1		1.3. 2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	nilai	76.13

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3.1			Indeks Aksesibilitas Infrastruktur		66.88
1.3.1			Indeks Konektivitas		46.71
1.3.1		1.3.2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	prosentase 55
1.3.1			Indeks Aksesibilitas Infrastruktur		66.88
1.3.1			Indeks Konektivitas		46.71
1.3.1		1.3.2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	prosentase 8
1.3.1			Indeks Aksesibilitas Infrastruktur		66.88
1.3.1			Indeks Konektivitas		46.71
1.3.1		1.3.2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	prosentase 48.3
1.3.1			Indeks Aksesibilitas Infrastruktur		66.88
1.3.1			Indeks Konektivitas		46.71
1.3.1		1.3.2.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70,35

Sumber : Rencana Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN/APBD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.	Nilai SAKIP	75
1.3.1	Menciptakan aksesibilitas yang mudah dan baik terhadap pemanfaatan infrastruktur dalam wilayah	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	66.88
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Konektivitas	46.71
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	0.5
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76.13
1.3.1.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	55
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	8
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	48.3
1.3.1.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70,35

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:

**Tabel 2.5**

**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap	80
1.3.1.1.1. 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik,persentase jalan dalam kondisi baik	80
1.3.1.1.1. 1.1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20
1.3.1.1.1. 1.2	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	50
1.3.1.1.1. 1.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	3
1.3.1.1.1. 1.4	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	40
1.3.1.1.1. 1.5	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1
1.3.1.1.1. 1.6	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20
1.3.1.1.1. 1.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	60
1.3.1.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	99.4
1.3.1.2.1. 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	99.4
1.3.1.2.1. 1.1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	10

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perpipaan yang dibangun	
1.3.1.2.1. 1.2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000
1.3.1.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak	96
1.3.1.2.2. 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses Sistem Air Limbah Domestik	96
1.3.1.2.2. 1.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1
1.3.1.2.2. 1.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1000
1.3.1.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	30
1.3.1.2.3. 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	77
1.3.1.2.3. 1.1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1000
1.3.1.2.3. 1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	2400
1.3.1.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	55
1.3.1.3.1. 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan	55

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kabupaten dalam kondisi baik	
1.3.1.3.1. 1.1	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1
1.3.1.3.1. 1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	0
1.3.1.3.1. 1.3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	0
1.3.1.3.1. 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	55
1.3.1.3.1. 2.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.5
1.3.1.3.1. 2.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5
1.3.1.3.1. 2.3	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	20
1.3.1.4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR	95
1.3.1.4.1. 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan RTR	1
1.3.1.4.1. 1.1	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1
1.3.1.4.1. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang	95
1.3.1.4.1. 2.1	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR	7

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	
1.3.1.4.1. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang	100
1.3.1.4.1. 3.1	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	2
1.3.1.5.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung	100
1.3.1.5.1. 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan IMB dan SLF	100
1.3.1.5.1. 1.1	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	4
1.3.1.5.1. 1.2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1
1.3.1.5.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	% Jumlah Bantuan Teknis Penataan bangunan gedung dan lingkungannya	30
1.3.1.5.2. 1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan,	30

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		pengawasan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	
1.3.1.5.2. 1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1
1.3.1.5.3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pertumbuhan ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi	10
1.3.1.5.3. 1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan kegiatan yang ada pada OPD di Kab Rembang	1
1.3.1.5.3. 1.1	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1
1.3.1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP dan Nilai IKM DPU Taru	70,35 77,90
1.3.1.6.1. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
1.3.1.6.1. 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2
1.3.1.6.1. 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2
1.3.1.6.1. 1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.6.1. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100
1.3.1.6.1. 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105
1.3.1.6.1. 2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
1.3.1.6.1. 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100
1.3.1.6.1. 3.1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1
1.3.1.6.1. 4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100
1.3.1.6.1. 4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48
1.3.1.6.1. 5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100
1.3.1.6.1. 5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
1.3.1.6.1. 5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
1.3.1.6.1. 5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1
1.3.1.6.1. 5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1
1.3.1.6.1. 5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penggandaan yang Disediakan	
1.3.1.6.1. 5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	480
1.3.1.6.1. 5.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1
1.3.1.6.1. 5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36
1.3.1.6.1. 6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100
1.3.1.6.1. 6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	58
1.3.1.6.1. 6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31
1.3.1.6.1. 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
1.3.1.6.1. 7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5
1.3.1.6.1. 7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
1.3.1.6.1. 7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
1.3.1.6.1. 7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
1.3.1.6.1. 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	95
1.3.1.6.1. 8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	11

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1.3.1.6.1. 8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	27
1.3.1.6.1. 8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36
1.3.1.6.1. 8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2024

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN/APBD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.	Nilai SAKIP	75	71,75	95,67	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi oleh Deputi RBKUNWAS Kementerian PANRB.
1.3.1	Menciptakan aksesibilitas yang mudah dan baik terhadap pemanfaatan infrastruktur dalam wilayah	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	66.88	36,75	54,95	Rendah	DPUTARU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Konektivitas	DISHUB	DISHUB	DISHUB	DISHUB	DISHUB
1.3.1 .1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Akseibilitas Jalan	0.50	0.41	81.60	Tinggi	Bidang Bina Marga DPUTARU
1.3.1 .2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76.13	76.45	100.42%	Sangat Tinggi	Bidang Sanitasi dan Air Minum DPUTARU
1.3.1 .3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	55%	40.43%	73.51%	Sedang	Bidang Sumber Daya Air DPUTARU
1.3.1 .4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	8	1	12,5%	Sangat Rendah	Bidang Tata Ruang DPUTARU
1.3.1 .5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	48.3%	31.95%	66.16%	Sedang	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi DPUTARU
1.3.1 .6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70.35	70.56	100.29	Sangat Tinggi	SEKRETAR IAT DPUTARU

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Berdasarkan tabel 3.2 diatas menjelaskan bahwa tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari misi Pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan

Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Pada Tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang menetapkan Indikator Kinerja Yaitu Indeks Aksesibilitas Infrastruktur sebesar 66,88% dan di Tahun 2024 tercapai sebesar 36,75 kategori rendah.

Dari hasil pengukuran kinerja di atas bahwa pada tahun 2024 Indeks Aksesibilitas Jalan memiliki pencapaian kinerja sebesar 0,41% kategori Tinggi, Indeks Akses Layanan Dasar memiliki pencapaian 76.45% kategori Sangat Tinggi, Persentase ketersediaan air baku 40.43% kategori Sedang, dan Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi memiliki capaian 31.95% dalam kategori Sedang. Sedangkan Prosentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang 12,50% kategori Sangat Rendah, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa melaksanakan program kegiatan secara optimal.

### 3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2021, 2022, dan 2023

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	63,82	64,15	64,74	75	71,75	95,67
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	72,63	38,15	36,82	66.88	36,75	54,95
1.3.1		Indeks Konektivitas	DISHUB	DISHUB	DISHUB	DISHUB	DISHUB	DISHUB
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	Na	0,02	0,41	0.50	0.41	81.60

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Na	52,67	73,44	76.13	76,45	100,42%
1.3.1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	35%	29,90%	30,70%	55%	40,43%	73,51%
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Na	3	2	8	1	12,5%
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Na	47,30%	47,78%	48.3%	31,95%	66,16%
1.3.1.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	69,68	70,40	70,56	70,35	70,56	100,29

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Berdasarkan Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur dimana pada Tahun 2024 Realisasi tujuan tersebut sebesar 36,75 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 36,82 dan Tahun 2022 sebesar 38,15 hal ini terjadi karena beberapa angka realisasi capaian sasaran mengalami penurunan.

Sedangkan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari misi Pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan dengan Indikator Kinerja Indeks Aksesibilitas Jalan ada diangka yang sama dari Tahun 2023 yaitu sebesar 0,41 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 0,02 mengalami peningkatan yang cukup baik.

Sasaran 2. Meningkatnya Akses Layanan Dasar dengan Indikator Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar Tahun 2024 sebesar 76,45 mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir dari Tahun 2022 sebesar 52,67 dan Tahun 2023 sebesar 73,44.

Sasaran 3. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku Tahun 2024 sebesar 40,43% mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 35%, Tahun 2022 sebesar 29,90 dan Tahun 2023 sebesar 30,70%.

Sasaran 4. Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah dengan Indikator Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang Tahun 2024 tercapai 1 dokumen mengalami penurunan dari Tahun 2022 tercapai 3 dokumen, Tahun 2023 tercapai 2 dokumen. Hal ini terjadi karena diperlukan anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan target secara optimal.

Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi dengan Indikator % Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2024 realisasi sebesar 31,95% mengalami penurunan dari Tahun 2022 sebesar 47,30%, dan Tahun 2022 sebesar 47,30%. Hal ini terjadi karena menurunnya jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi.

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik dengan Indikator Nilai SAKIP OPD Tahun 2024 sebesar 70,56%

mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 69,68%, Tahun 2022 sebesar 70,40 dan Tahun 2023 sebesar 70,56%

### 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	71,75	75	95,67
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	36,75	66.88	54,95
1.3.1		Indeks Konektivitas	DISHUB	DISHUB	DISHUB
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	0.41	0.50	81,60
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76,45	76.13	100,42%
1.3.1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	40,43	55	73,51%
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	1	8	12,5%
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	31,95	48.3	10,89%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.3.1. 6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70,56	70,35	100,29

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Dari Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur* dimana pada Tahun 2024 Realisasi kinerja Indeks Aksesibilitas Infrastruktur hingga tahun ini tercatat sebesar 36,75, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 66,88. Perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian yang diperoleh baru mencapai sekitar 54,9% dari target yang diharapkan. Realisasi yang jauh lebih rendah dari target menunjukkan adanya keterlambatan atau hambatan dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas infrastruktur.

Sasaran 1 *Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan*

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi Indeks Aksesibilitas Jalan tahun ini: 0,41
- Target jangka menengah: 0,50

Capaian hingga saat ini baru mencapai sekitar 81,60% dari target yang telah ditetapkan adanya capaian di bawah target realisasi menunjukkan bahwa upaya meningkatkan pemerataan dan kualitas akses jalan belum sepenuhnya sesuai dengan rencana strategis.

Sasaran 2 *Meningkatnya Akses Layanan Dasar*

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar tahun ini: 76,45
- Target jangka menengah: 76,13

Realisasi kinerja sebesar 76,45 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 76,13 (100,42% dari target). Pencapaian ini

menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air minum layak dan sanitasi layak. Program peningkatan akses layanan dasar telah berjalan secara efektif.

Sasaran 3: *Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air*

*Perbandingan Kinerja:*

- Realisasi Persentase Ketersediaan Air Baku tahun ini: 40,43%
- Target jangka menengah: 55%

Realisasi kinerja baru mencapai sekitar 73,5% dari target yang ditetapkan, menunjukkan adanya kesenjangan dari target yang seharusnya dicapai. Hal ini berdampak pada ketersediaan air baku masih belum optimal pada sektor rumah tangga, pertanian, dan industri.

Sasaran 4 *Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah*

*Perbandingan Kinerja:*

- Realisasi capaian dokumen rencana tata ruang tahun ini: 1 dokumen
- Target jangka menengah: 8 dokumen

Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi baru mencapai 12,5% dari target yang telah ditetapkan, Capaian Kinerja di Bawah Target hal ini menunjukkan Perencanaan dan perwujudan tata ruang daerah masih sangat terbatas sehingga target yang ditetapkan belum dapat dicapai secara optimal.

Sasaran 5 *Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi*

*Perbandingan Kinerja:*

- Realisasi pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi hingga ini: 31,95%
- Target jangka menengah: 48,3%

Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi baru mencapai 66,16% dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi masih belum maksimal serta adanya hambatan dalam penyelenggaraan layanan yang menyebabkan pertumbuhan lebih lambat dari yang diharapkan.

Sasaran 6 *Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, Ketepatan capaian target kinerja, Ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.*

*Perbandingan Kinerja:*

- Realisasi Nilai SAKIP OPD tahun ini: 70,56
- Target jangka menengah: 70,35

Capaian kinerja telah melampaui target. Adanya peningkatan dalam pengelolaan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program berjalan cukup baik, serta adanya peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi program serta akuntabilitas kinerja.

### 3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/  
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1. 1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	71,75	75	95,67
1.3. 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	36,75	Na	-
1.3. 1		Indeks Konektivitas	DINHUB	DINHUB	DINHUB
1.3. 1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,41	Na	-
1.3. 1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76,45	Na	-
1.3. 1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	40,43	Na	-
1.3. 1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program	1	Na	-

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
		Rencana Tata Ruang			
1.3. 1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	31,95	Na	-
1.3. 1.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70,56	Na	-

Sumber : Berbagai sumber yang relevan seperti BPS, dsb

Dari Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Dari Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur dengan indikator Indeks Aksesibilitas Infrastruktur.*

Berdasarkan informasi yang tersedia, Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2024 belum dipublikasikan secara spesifik. Namun upaya Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi berbagai program untuk meningkatkan aksesibilitas infrastruktur, antara lain:

- Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah secara rutin mempublikasikan data kondisi jalan, termasuk persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik.
- Perencanaan Jangka Panjang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yang menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen dan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah.

*Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan dengan indikator Indeks Aksesibilitas Jalan*

Berdasarkan informasi, Indeks Aksesibilitas Jalan Kabupaten Pati untuk Tahun 2024 belum dipublikasikan secara spesifik. Gambaran umum mengenai aksesibilitas infrastruktur jalan di Kabupaten Pati :

- Kondisi Jalan Kabupaten Pati: Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Kabupaten Pati, terdapat informasi mengenai panjang dan kondisi jalan berdasarkan kewenangan dari tahun 2020 hingga 2023. Data ini hanya mencakup detail mengenai panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Melalui website [opendata.patikab.go.id](https://opendata.patikab.go.id). Sehingga tidak dapat diperbandingkan kondisi jalan baik maupun sedang tahun 2024.
- Sistem Informasi Jalan Kabupaten Pati (SIJAKA)  
Pemerintah Kabupaten Pati telah mengembangkan platform SIJAKA Pati, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan secara langsung. Melalui platform ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi mengenai kerusakan jalan, seperti jalan berlubang, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Inisiatif ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan responsivitas terhadap permasalahan infrastruktur jalan, sedangkan di Kabupaten Rembang saat ini belum ada.

*Sasaran 2 Meningkatkan Akses Layanan Dasar dengan Indikator Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar*

Dari Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar ada beberapa indikator terkait yang dapat diperbandingkan untuk memberikan gambaran mengenai aksesibilitas layanan dasar diantaranya :

- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen), 2024  
Provinsi Jawa Tengah 95,43  
Kabupaten Rembang 98,07

- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Klasifikasi Desa (Persen), 2024  
Provinsi Jawa Tengah 86,72  
Kabupaten Rembang 92,71

**3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	75	71,75	95,67		
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	66.88	36,75	54,95		
1.3.1		Indeks Konektivitas	46.71	DISHUB	DISHUB		
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	0.50	0,41	81,60		
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76.13	76,45	100,42		
1.3.1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	55 %	40,43%	73,51%		
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata	Capaian Perwujudan Program	8	1	12,5%		

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Ruang Daerah	Rencana Tata Ruang					
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	48,3	31,95	66,16		
1.3.1.6	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70,35	70,56	100,29		

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Dari Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalann dan Solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur* dimana pada Tahun 2024 Realisasi kinerja Indeks Aksesibilitas Infrastruktur tahun ini tercatat sebesar 36,75, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 66,88. Perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian yang diperoleh baru mencapai sekitar 54,9% dari target yang diharapkan. Realisasi yang jauh lebih rendah dari target menunjukkan adanya keterlambatan atau

hambatan dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas infrastruktur.

Sasaran 1 *Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan*

Perbandingan Kinerja:

- Target : 0,50
- Realisasi Indeks Aksesibilitas Jalan Tahun 2024 : 0,41
- Capaian : 81,60%

menunjukkan bahwa upaya meningkatkan pemerataan dan kualitas akses jalan belum sepenuhnya sesuai dengan rencana strategis.

Faktor yang mempengaruhi:

- Hambatan Proyek Infrastruktur: Keterlambatan pembangunan jalan akibat factor teknis atau cuaca
- Terbatasnya Anggaran atau terlambatnya proses lelang proyek.

Solusi yang dapat dilakukan:

- Percepatan Proyek Prioritas: Fokus pada proyek strategis kabupaten yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap aksesibilitas
- Optimalisasi Anggaran: Mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien untuk paket pekerjaan yang sedang berjalan
- Monitoring dan evaluasi rutin: Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kerja

Sasaran 2 *Meningkatnya Akses Layanan Dasar*

Perbandingan Kinerja:

Target : 76,13

Realisasi Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar hingga tahun ini: 76,45

Capaian : 100,42

Realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti air minum layak dan sanitasi layak. Program peningkatan akses layanan dasar telah berjalan efektif.

Upaya peningkatan kedepan yang dapat dilakukan :

- Pemerataan Layanan: pada wilayah yang masih tertinggal dalam akses layanan dasar.
- Peningkatan Kualitas: Melakukan evaluasi rutin terhadap layanan yang sudah tersedia.

- Optimalisasi Anggaran: Mengalokasikan anggaran secara efektif dan tepat guna.

Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air

Perbandingan Kinerja:

Target : 55

Realisasi Persentase Ketersediaan Air Baku hingga tahun ini: 40,43%

Capaian: 73,51%

Realisasi kinerja mencapai sekitar 73,5% dari target yang ditetapkan, menunjukkan adanya kesenjangan dari target yang seharusnya dicapai. Hal ini berdampak pada ketersediaan air baku masih belum optimal pada sektor rumah tangga, pertanian, dan industri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Curah Hujan dan Perubahan Iklim → Kekeringan atau perubahan pola hujan dapat mengurangi sumber air baku.
- Keterbatasan Infrastruktur → Bendungan, waduk, atau sistem distribusi air yang belum maksimal.
- Pencemaran Sumber Air → Kualitas air yang tidak memenuhi standar mengurangi pasokan yang layak digunakan.
- Alih Fungsi Lahan → Berkurangnya daerah resapan air.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air → Membangun dan merehabilitasi bendungan, waduk, dan saluran air.
- Peningkatan Konservasi Sumber Air → Menggalakkan penghijauan dan perlindungan daerah resapan air.
- Kolaborasi dengan Masyarakat dan Swasta → Mendorong peran serta berbagai pihak dalam menjaga dan mengelola sumber daya air.

Sasaran 4 Meningkatnya Perwujudan *Rencana Tata Ruang Daerah*

Perbandingan Kinerja :

- Target : 8 dokumen
- Realisasi capaian dokumen rencana tata ruang hingga tahun ini: 1 dokumen
- Capaian : 12,5%

Menunjukkan bahwa realisasi baru mencapai 12,5% dari target yang telah ditetapkan, Capaian Kinerja masih di Bawah Target hal ini menunjukkan Perencanaan dan perwujudan tata ruang daerah masih sangat terbatas sehingga Target yang ditetapkan belum dapat dicapai secara optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Proses Penyusunan yang Panjang → Pembuatan dokumen rencana tata ruang memerlukan koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai pihak.
- Kendala Regulasi dan Administrasi → Persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah sering mengalami keterlambatan.
- Kurangnya Sumber Daya → Keterbatasan tenaga ahli dan anggaran dalam penyusunan dokumen.
- Dinamika Wilayah → Perubahan penggunaan lahan yang cepat mempersulit perencanaan yang tepat dan efektif.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- Percepatan Penyusunan Dokumen → Menyederhanakan proses administrasi dan mempercepat koordinasi antarinstansi.
- Peningkatan Kapasitas SDM → Menambah tenaga ahli dan pelatihan dalam perencanaan tata ruang.
- Pemanfaatan Teknologi GIS → Menggunakan sistem informasi geografis (GIS) untuk mempercepat analisis dan pemetaan tata ruang.
- Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan → Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam penyusunan tata ruang.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala → Meninjau progres setiap tahap untuk memastikan dokumen dapat selesai sesuai jadwal.

*Sasaran 5 Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi*

Perbandingan Kinerja:

Target : 48,3%

Realisasi pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi hingga tahun ini: 31,95%

Capaian : 66,16%

Capaian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi masih belum optimal serta adanya hambatan dalam penyelenggaraan layanan yang menyebabkan pertumbuhan lebih lambat dari yang diharapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Keterbatasan SDM Ahli → Jumlah tenaga teknis dan profesional di bidang bangunan gedung dan jasa konstruksi masih terbatas.

- Kendala Regulasi dan Perizinan → Proses birokrasi yang panjang memperlambat pengadaan dan pelaksanaan proyek.
- Anggaran yang Tidak Optimal → Keterbatasan anggaran menyebabkan berkurangnya program bantuan teknis.
- Kurangnya Pemanfaatan Teknologi → Digitalisasi dan sistem monitoring belum diterapkan dalam penyelenggaraan layanan.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- Percepatan Penyediaan SDM Ahli → Menambah pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di bidang bangunan dan jasa konstruksi.
- Penyederhanaan Regulasi → Mempercepat proses perizinan agar lebih efisien tanpa mengurangi aspek pengawasan dan keamanan.
- Optimalisasi Anggaran → Mengalokasikan dana lebih efektif untuk meningkatkan layanan bantuan teknis.
- Kolaborasi dengan Sektor Swasta → Menggandeng perusahaan konstruksi untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan bangunan.

*Sasaran 6 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, Ketepatan capaian target kinerja, Ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.*

Perbandingan Kinerja:

Target : 70,35

Realisasi Nilai SAKIP OPD hingga tahun ini: 70,56

Capaian : 100,29

Capaian kinerja telah melampaui target. Adanya peningkatan dalam pengelolaan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program berjalan cukup baik, serta adanya peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi program serta akuntabilitas kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Peningkatan Sistem Perencanaan → Perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih matang dan berbasis data.
- Evaluasi dan Monitoring yang Konsisten → Adanya laporan kinerja pertriwulan terhadap kinerja OPD.
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas → Penguatan pelaporan dan keterbukaan informasi publik.

- Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Kinerja → Implementasi sistem digital/aplikasi dalam manajemen kinerja dan pelaporan.

Upaya peningkatan kedepan yang dapat dilakukan adalah :

- Peningkatan Kapasitas SDM → Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang SAKIP dan pengelolaan kinerja.
- Peningkatan Kualitas Layanan Publik → Fokus pada kepuasan masyarakat dengan layanan yang lebih cepat dan efisien.
- Penyempurnaan Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja → Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**

#### **Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatn ya Kapasitas dan Akuntabilita s Kinerja Pemerintah an	75	71,75	95,67	-	-	-	-
1.3.	Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Infrastrukturu	66.88	36,75	54,95	63.794.147.311	61.557.303.622	96,49%	-75,6
1.3.					63.794.147.311	61.557.303.622		
1.3. 1.1	Meningkatn ya pemerataan dan kualitas pembangun an jalan dan jembatan	0.50	0,41	81,60	35.075.274.000	33.953.505.926	96,80%	-18,63

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 1.2	Meningkatn ya Akses Layanan Dasar	76.13	76,45	100,42	7.724.122.000	7.328.307.360	94,88%	5,52%
1.3. 1.3	Meningkatn ya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	55	40,43	73,51	6.792.352.900	6.608.154.178	97,29%	-32,35%
1.3. 1.4	Meningkatn ya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	8	1	12,5	60.000.000	58.746.494	97,91%	-683,28%
1.3. 1.5	Meningkatn ya Kualitas Hasil Penyelengga raan Bangunan Gedung Dan Lingkungan nya serta layanan jasa kontruksi	48.3	31,95	66,16	2.568.947.850	2.429.630.611	94,58%	-42,96%
1.3. 1.6	Meningkatn ya kualitas dokumen perencanaa n, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaa n program kegiatan, dan Meningkatk nya akuntabilita s kinerja dan	70,35	70,56	100,29	11.573.450.561	11.178.959.053	96,59%	3,69%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
				Capaian	(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kualitas pelayanan publik							

Sumber : LAPORAN CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

Dari tabel 3.7. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pada Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar -75,6%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran tidak efisien karena persentase rasio diangka negatif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - 175,6\%$$

$$\text{Efisiensi} = -75,6\%$$

- Pada Sasaran Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar -18,63%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran tidak efisien karena persentase rasio diangka negatif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - 118,63\%$$

$$\text{Efisiensi} = -18,63\%$$

- Pada Sasaran Meningkatnya Akses Layanan Dasar dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar 5,52%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran masih efisien karena persentase rasio diangka positif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - 94,48\%$$

$$\text{Efisiensi} = 5,52\%$$

- Pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar -32,35%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran tidak efisien karena persentase rasio diangka negatif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - 132,35\%$$

$$\text{Efisiensi} = -32,35\%$$

- Pada Sasaran Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar -683,28%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran tidak efisien karena persentase rasio diangka negatif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - 783,28\%$$

$$\text{Efisiensi} = -683,28\%$$

- Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar -42,96%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran tidak efisien karena persentase rasio diangka negatif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - 142,96\%$$

$$\text{Efisiensi} = -42,96\%$$

- Pada Sasaran Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas Pelayanan Publik dengan rasio efisiensi sesuai rumus diperoleh sebesar 3,69%, hal tersebut menunjukkan secara rasio anggaran masih efisien karena persentase rasio diangka positif.

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 100\% - 96,31\%$$

$$\text{Efisiensi} = 3,69\%$$

### **3.1.8 Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	95,67					
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur						
1.3.1		Indeks Konektivitas						
1.3.1.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	0,41	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap	89	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3.1.1.1.1				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Persentase jalan dalam kondisi baik,persentase jalan dalam kondisi baik	89	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3.1.1.1.1.1				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	96	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3.1.1.1.1.2				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		
1.3.1.1.1.1.3				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	-		
1.3.1.1.1.1.4				Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2,5	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3.1.1.1.1.5				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	59,42	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3.1.1.1.1.6				Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	13	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 1.1. 1.1. 7				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	105	Menunjang	Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat
1.3. 1.2. 1	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	76,45	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	93	Menunjang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang Layak untuk kebutuhan masyarakat
1.3. 1.2. 1.1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	93	Menunjang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang Layak untuk kebutuhan masyarakat
1.3. 1.2. 1.1. 1				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	70	Menunjang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang Layak untuk kebutuhan masyarakat
1.3. 1.2. 1.1. 2				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		
1.3. 1.2. 2				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak	97%	Menunjang	Pembangunan Sistem Air Limbah Layak Rumah Tangga
1.3. 1.2. 2.1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses Sistem Air Limbah Domestik	97	Menunjang	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Layak untuk Kebutuhan Rumah Tangga
1.3. 1.2. 2.1. 1				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	100	Menunjang	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Layak untuk Kebutuhan Rumah Tangga

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 1.2. 2.1. 2				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	40	Menunjang	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Layak untuk Kebutuhan Rumah Tangga
1.3. 1.2. 3				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	100	Menunjang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.3. 1.2. 3.1				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	94	Menunjang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.3. 1.2. 3.1. 1				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	15	Menunjang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.3. 1.2. 3.1. 2				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	100	Menunjang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.3. 1.3. 1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	40,43	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	95	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.1				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	111	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.1. 1				Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	67	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.1. 2				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	-		
1.3. 1.3. 1.1. 3				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	-		
1.3. 1.3. 1.2				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	82	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.2. 1				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	18	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.2. 2				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	70	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan ketahanan pangan
1.3. 1.3. 1.2. 3				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	100	Menunjang	Pembangunan Bangunan Air/Irigasi untuk keperluan irigasi dalam rangka kemantapan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								ketahanan pangan
1.3. 1.4. 1	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.1				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	Penetapan RTR	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.1. 1				Penetapan RDTR Kabupaten /Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.2				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.2. 1				Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.3				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.4. 1.3. 1				Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	100	Menunjang	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR
1.3. 1.5. 1	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung	31,95	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung	100	Menunjang	Penyelenggaraan Bantuan Teknis Bangunan Gedung

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dan Jasa Konstruksi						
1.3. 1.5. 1.1				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan IMB dan SLF	100	Menunjang	Penyelenggaraan Bantuan Teknis Bangunan Gedung
1.3. 1.5. 1.1. 1				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	100	Menunjang	Penyelenggaraan Bantuan Teknis Bangunan Gedung
1.3. 1.5. 1.1. 2				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100	Menunjang	Penyelenggaraan Bantuan Teknis Bangunan Gedung

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 1.5. 2				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	% Jumlah Bantuan Teknis Penataan bangunan gedung dan lingkungannya	100	Menunjang	Penyelenggaraan Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya
1.3. 1.5. 2.1				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	100	Menunjang	Penyelenggaraan Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya
1.3. 1.5. 2.1. 1				Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	100	Menunjang	Penyelenggaraan Bantuan Teknis Bangunan Gedung
1.3. 1.5. 3				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pertumbuhan ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi	100	Menunjang	Penyelenggaraan tertib penyelenggaraan konstruksi
1.3. 1.5. 3.1				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan kegiatan yang ada pada OPD di Kab Rembang	100	Menunjang	Penyelenggaraan tertib penyelenggaraan konstruksi
1.3. 1.5. 3.1. 1				Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Menunjang	Penyelenggaraan tertib penyelenggaraan konstruksi
1.3. 1.6. 1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	70,56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai IKM DPU Taru	70,56 88,77	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 1.6. 1.1. 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.1. 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	400	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.1. 3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	400	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.2. 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.2. 2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.3. 1				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	1200	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			program kegiatan
1.3. 1.6. 1.4				Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.4. 1				Pendataan dan Pengolaha n Administra si Kepegawai an	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5				Administra si Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 7				Penyediaan Bahan/Ma terial	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								program kegiatan
1.3. 1.6. 1.5. 8				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	93	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.6. 1				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.6. 2				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.7. 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.7. 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.7. 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.7. 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Umum Kantor yang Disediakan			pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.8.				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.8. 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	436	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.8. 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	81	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.8. 3				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
1.3. 1.6. 1.8. 4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	100	Menunjang	Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.075.274.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 33.953.505.000,00. Sedangkan realisasi kinerja sebesar 71,17% dan realisasi keuangan sebesar 96,80% yang diarahkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas perekonomian masyarakat.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  
Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.792.352.900,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.608.154.178,00. Adapun capaian realisasi kinerja sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar 97,29% Program ini dilaksanakan untuk penanganan irigasi dan sumber daya air lainnya. Ada beberapa kegiatan yang mendukung terlaksananya program ini. Dengan adanya program ini tentunya sangat membantu terlayannya ketersediaan sumber air untuk keperluan irigasi dan optimalnya fungsi jaringan irigasi sehingga ketahanan pangan dimasyarakat dapat terwujud.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  
Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.839.824.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 3.515.365.788,00. Adapun capaian realisasi kinerja sebesar 93% dan realisasi keuangan sebesar 91,55%. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sangat mendukung keberhasilan program ini.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.588.716.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 3.526.359.572,00. Adapun capaian realisasi kinerja sebesar 97% dan realisasi keuangan sebesar 98,26%. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL) mendukung keberhasilan program ini.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase  
Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 295.582.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 286.582.000,00. Adapun realisasi capaian kinerja kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,96% dengan adanya Pembangunan Sistem Drainase telah mendukung keberhasilan program ini.
6. Program Penataan Bangunan Gedung  
Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.516.600.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.381.302.761,00. Adapun realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,62% yang diarahkan untuk mengendalikan pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan lainnya dan melaksanakan penerbitan IMB dan SLF.
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 39.347.850,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 39.347.850,00. Adapun realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100% yang diarahkan untuk kegiatan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.980.000,00. Adapun realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 69,08% yang dilaksanakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas pengelola SIPJAKI.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 58.746.494,00. Adapun capaian realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,91%. Kegiatan yang mendukung keberhasilan program ini adalah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Lasem dengan dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.573.450.561,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.178.959.053,00. Adapun capaian realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,59%. Ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sangat mendukung tercapainya target program ini.

### **3.1.9 Realisasi Anggaran**

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	35.075.274.000	33.953.505.926	96,80%
1.3.1.1.1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	35.075.274.000	33.953.505.926	96,80%
1.3.1.1.1.1.1	Pembangunan Jalan	24.459.030.000	23.988.047.654	98,07%
1.3.1.1.1.1.2	Pemeliharaan Berkala Jalan	50.800.000	50.800.000	100%
1.3.1.1.1.1.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	5.300.000	5.300.000	100%
1.3.1.1.1.1.4	Pembangunan Jembatan	128.463.919	127.530.775	99,27%
1.3.1.1.1.1.5	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	346.100.000	295.624.700	85,42%
1.3.1.1.1.1.6	Rehabilitasi Jalan	2.201.159.000	2.178.649.997	98,98%
1.3.1.1.1.1.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.884.421.081	7.307.552.800	92,68%
1.3.1.1.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.839.824.000	3.515.365.788	91,55%
1.3.1.1.2.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.839.824.000	3.515.365.788	91,55%
1.3.1.1.2.1.1.1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.739.824.000	3.511.419.788	93,89%
1.3.1.1.2.1.1.2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100.000.000	3.946.000	3,95%

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.2. 2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.588.716.000	3.526.359.572	98,26%
1.3.1.2. 2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.588.716.000	3.526.359.572	98,26%
1.3.1.2. 2.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	90.000.000	51.508.572	57,23%
1.3.1.2. 2.1.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.498.716.000	3.474.851.000	99,32%
1.3.1.2. 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	295.582.000	286.582.000	96,96%
1.3.1.2. 3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	295.582.000	286.582.000	96,96%
1.3.1.2. 3.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	195.582.000	186.582.000	95,40%
1.3.1.2. 3.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000	100.000.000	100%
1.3.1.3. 1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.792.352.900	6.608.154.178	97,29%
1.3.1.3. 1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	5.114.276.960	4.962.179.428	97,03%

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.3.1.3. 1.1.1	Pembangunan Tanggul Sungai	5.114.276.960	4.962.179.428	97,03%
1.3.1.3. 1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.3.1.3. 1.1.3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.3.1.3. 1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.678.075.940	1.645.974.750	98,09%
1.3.1.3. 1.2.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.338.075.940	1.307.677.750	97,73%
1.3.1.3. 1.2.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	310.000.000	308.297.000	99,45%
1.3.1.3. 1.2.3	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	30.000.000	30.000.000	100%
1.3.1.4. 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	60.000.000	58.746.494	97,91%
1.3.1.4. 1.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	30.000.000	29.397.494	97,99

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(RRTR) Kabupaten/Kota			
1.3.1.4. 1.1.1	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	30.000.000	29.397.494	97,99%
1.3.1.4. 1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.646.000	98,23%
1.3.1.4. 1.2.1	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	20.000.000	19.646.000	98,23%
1.3.1.4. 1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.703.000	97,03%
1.3.1.4. 1.3.1	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	10.000.000	9.703.000	97,03%
1.3.1.5. 1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.516.600.000	2.381.302.761	94,62%
1.3.1.5. 1.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.516.600.000	2.381.302.761	94,62%
1.3.1.5. 1.1.1	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	2.442.150.000	2.343.802.761	95,97%

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.5. 1.1.2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	74.450.000	37.500.000	50,37%
1.3.1.5. 2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	39.347.850	39.347.850	100%
1.3.1.5. 2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	39.347.850	39.347.850	100%
1.3.1.5. 2.1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	39.347.850	39.347.850	100%
1.3.1.5. 3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	13.000.000	8.980.000	69,08%
1.3.1.5. 3.1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000	8.980.000	69,08%
1.3.1.5. 3.1.1	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	13.000.000	8.980.000	69,08%
1.3.1.6. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	11.573.450.561	11.178.959.053	96,59%

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.3.1.6. 1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		
1.3.1.6. 1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0		
1.3.1.6. 1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0		
1.3.1.6. 1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		
1.3.1.6. 1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.944.089.228	8.620.624.095	96,38%
1.3.1.6. 1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.641.857.561	8.323.984.095	96,31%
1.3.1.6. 1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	302.231.667	296.640.000	98,15%
1.3.1.6. 1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.400.000	14.400.000	100%
1.3.1.6. 1.3.1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000	14.400.000	100%
1.3.1.6. 1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	380.000	380.000	100%
1.3.1.6. 1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	380.000	380.000	100%

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.6. 1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.182.297	139.618.517	97,51%
1.3.1.6. 1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.072.750	6.000.000	98,80%
1.3.1.6. 1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.732.400	5.469.000	95,41%
1.3.1.6. 1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	8.996.625	99,96%
1.3.1.6. 1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	4.999.900	99,99%
1.3.1.6. 1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.126.147	31.121.050	99,98%
1.3.1.6. 1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
1.3.1.6. 1.5.7	Penyediaan Bahan/Material	28.360.000	26.482.180	93,38%
1.3.1.6. 1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.891.000	56.549.762	97,68%
1.3.1.6. 1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.237.500	49.123.650	97,78%
1.3.1.6. 1.6.1	Pengadaan Mebel	50.000.000	48.886.150	97,78%
1.3.1.6. 1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.500	237.500	100%
1.3.1.6. 1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.219.811.000	2.156.397.491	97,14%
1.3.1.6. 1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100%

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.1.6. 1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.400.000	116.350.616	92,78%
1.3.1.6. 1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.700.000	4.700.000	100%
1.3.1.6. 1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.088.711.000	2.034.346.875	97,40%
1.3.1.6. 1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.350.536	198.415.300	98,54%
1.3.1.6. 1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.980.536	62.767.800	98,10%
1.3.1.6. 1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	120.000.000	118.337.500	98,61%
1.3.1.6. 1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.870.000	4.830.000	99,17%
1.3.1.6. 1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.500.000	12.480.000	99,84%

Sumber : Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran yang Dialokasikan

- Total anggaran sebesar Rp. 63.794.147.311,00 merupakan anggaran yang direncanakan untuk mendukung berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun anggaran.

2. Realisasi Penggunaan Anggaran

- Anggaran yang terserap sebesar Rp. 61.557.303.622 menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah direalisasikan untuk mendukung pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan.

### 3. Capaian Kinerja

- Persentase capaian: 96,49% berarti hampir seluruh target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah berhasil dicapai, menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

### 4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

- Efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan anggaran yang direalisasikan terhadap anggaran yang dialokasikan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{61.557.303.622}{63.794.147.311} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 96,49\%$$

Tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan dengan baik dengan efisiensi sebesar 96,49%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang telah mengelola sumber daya secara optimal dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Program, kegiatan dan sub kegiatan telah berjalan sesuai rencana dengan capaian kinerja yang tinggi telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **3.1.10. Prestasi yang dicapai**

## **Kepatuhan Penataan Ruang, Pemkab Rembang Raih Peringkat Ketiga SIWASTEK Jawa Tengah**



Kepatuhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang dalam penataan ruang membuahkan hasil. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah menobatkan Kabupaten Rembang sebagai juara ketiga se-Jawa Tengah dalam program SIWASTEK (Sistem Informasi Pengawasan Teknis Penataan Ruang). SIWASTEK adalah sistem informasi pengawasan teknis berbasis web yang dirancang untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam penataan ruang. Sistem ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan penataan ruang.

Penghargaan ini diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Sumarno, kepada Bupati Rembang yang diwakili oleh Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTaru) Kabupaten Rembang, Moh Nur Aziz, dalam seminar Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024 di Patra Hotel and Convention Semarang, Kamis (7/11/2024). Penilaian dalam ajang ini meliputi aspek perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam tata kelola ruang yang baik dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam hal penataan ruang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

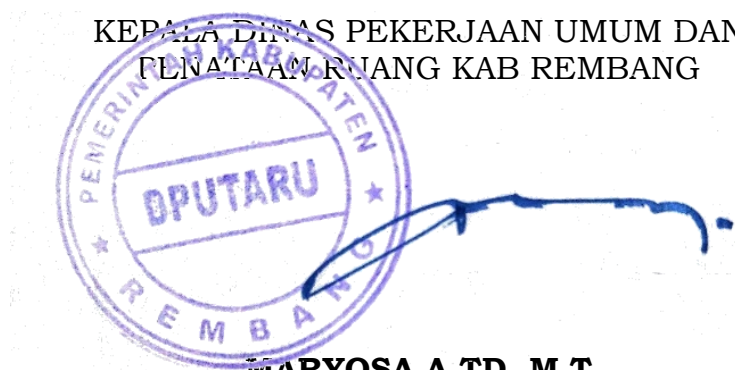
1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG memiliki enam sasaran strategis dengan dua sasaran strategis tercapai dan empat sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG adalah sebagai berikut:
  - Keterbatasan sumber daya alam
  - Anggaran yang tersedia belum cukup untuk membiayai program/kegiatan yang ada
  - Perubahan kondisi lingkungan alam
  - Keterbatasan kapasitas jalan
  - Belum memadai sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan
3. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemukhtahiran data jalan dan jembatan secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan penyelenggaraan jalan secara tepat sasaran dan prioritas.
- Melakukan pemukhtahiran data daerah irigasi secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sumber daya air secara tepat sasaran dan prioritas.
- Melakukan pemukhtahiran data rumah tangga yang terlayani akses air minum secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sistem penyediaan air minum secara merata.
- Melakukan pemukhtahiran data rumah tangga yang terlayani akses sanitasi secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestik secara merata.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KAB REMBANG



**MARYOSA, A. TD., M. T**

Pembina Utama Muda

NIP 19671211 199003 1 007

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024**

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax. (0295) 691033

REMBANG 59211

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARYOSA, A.TD. ,MT  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I  
Jabatan : BUPATI REMBANG

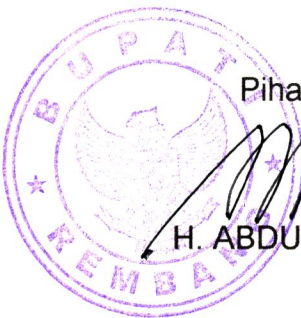
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, Januari 2024

Pihak Kedua



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama

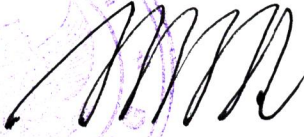
MARYOSA, A.TD. ,MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196712111990031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Tujuan</b>		
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	66,88
<b>2.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>		
2.1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,50
2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	76,13
2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	55
2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	8
2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya Serta Layanan Jasa Kontruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung Dan Jasa Kontruksi	48,3

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 10.785.863.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 6.275.000.000	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 3.839.824.000	APBD/APBN
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 3.588.716.000	APBD/APBN
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 300.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 2.127.000.000	APBD
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 1.700.000.000	APBD
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 30.801.000.000	APBD/APBN
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 13.000.000	APBD
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 60.000.000	APBD

Rembang, Januari 2024

**BUPATI REMBANG**  
  
**H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG**

  
**MARYOSA, A.T.D., MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196712111990031007

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada)**

Dilampirkan Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax. (0295) 691033

REMBANG 59211

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARYOSA, A.TD. ,MT  
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I  
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 12 November 2024

Pihak Kedua  
  
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama  
  
MARYOSA, A.TD. ,MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196712111990031007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG  
(PERUBAHAN)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Tujuan</b>		
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	66,88
<b>2.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>		
2.1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,50
2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	76,13
2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	55
2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	8
2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya Serta Layanan Jasa Kontruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung Dan Jasa Kontruksi	48,3

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 11.573.450.561	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 6.792.352.900	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 3.839.824.000	APBD/APBN
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 3.588.716.000	APBD/APBN
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 295.582.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 2.516.600.000	APBD
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 39.347.850	APBD
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 35.075.274.000	APBD/APBN
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 13.000.000	APBD
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 60.000.000	APBD
	Jumlah	Rp 63.794.147.311	

Rembang, 12 November 2024

BUPATI REMBANG



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG

